

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
PARA PIHAK TERKAIT JASA PERBAIKAN KAPAL
(STUDI PADA PT TUNAS KARYA
BAHARI INDONESIA)**

SKRIPSI



**Oleh:
Javirawati
160710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
PARA PIHAK TERKAIT JASA PERBAIKAN KAPAL
(STUDI PADA PT TUNAS KARYA
BAHARI INDONESIA)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Javirawati
160710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 21 Februari 2020
Yang membuat pernyataan,

Javirawati
160710028

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI
PARA PIHAK TERKAIT JASA PERBAIKAN KAPAL
(STUDI PADA PT TUNAS KARYA
BAHARI INDONESIA)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

**Javirawati
160710028**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 21-02-2020

RIZKI TRI ANUGRAH BHAKTI,SH.,MH

Pembimbing

ABSTRAK

PT. Tunas Karya Bahari Indonesia telah melakukan perbaikan kapal. Perbaikan kapal tersebut menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pemilik kapal kepada pihak PT Tunas Karya Bahari Indonesia. Kewajiban yang timbul atas perbaikan kapal dilakukan dalam sebuah perjanjian pembayaran dan pelunasan hutang yang melibatkan beberapa pihak. Perjanjian sendiri mengandung suatu pengertian yang memberikan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Ketika seseorang tidak melaksanakan prestasi ia terikat dalam sebuah tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Penelitian ini hendak menemukan jawaban mengenai pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia atas wanprestasi yang terjadi. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Pimpinan PT Tunas Karya Bahari Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa wanprestasi yang terjadi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang telah lalai, namun pada kasus ini para pihak tidak mempertanggungjawabkan kelalaiannya sebagaimana mestinya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia atas wanprestasi yang terjadi yaitu dengan cara menyelesaikannya diluar pengadilan, Pihak PT Tunas Karya Bahari Indonesia berusaha menjalin komunikasi dengan melakukan negosiasi kepada para pihak namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum, wanprestasi.

ABSTRACT

Road is local asset that society take benefit of. Government is known as an institution that has the right to take care and manage the road, however each city has their own road governance. There are two institutions that have authority to govern road in Batam, those are Batam Free Trade Zone and Free Port Management Agency (BP Batam) that was authorized based on President Decree No. 41 Year 1973 and Act No. 36 Year 2000 and Batam City Government that was authorized based on article 9 section 4 in conjunction with article 12 section 12 letter D of Act No. 23 year 2014 about local government. The purpose of this research is to find the justification of Batam City Government authority to manage the road when the management right is owned by BP Batam, along with road legal status after road widening project finish. Author approach the research problem by using empirical research method with qualitative approach. Data were obtained by author from interviews conducted with Department of Highways along with Financial and Asset Management Agency in Batam. Research results shown that there is lease agreement between two institutions, where BP Batam gave an authority to Batam City Government to perform their duty as local government to build infrastructures. In relation to the legal status, the agreement stated that the ownership is still owned by BP Batam and not transferred to Batam City Government.

Keywords: *Road, Authority, Local Government.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, sekaligus selaku pembimbing skripsi penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;

5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam sekaligus sebagai dosen penguji skripsi penulis;
6. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam sekaligus sebagai dosen penguji skripsi penulis;
8. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
9. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
10. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
11. Bapak Radius, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
12. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
13. Seluruh dosen dan staf Universitas Putera Batam;
14. Bapak Woon Swee Huat selaku pimpinan dan seluruh staff PT. Tunas Karya Bahari Indonesia;
15. Kedua orang tua dan saudara kandung penulis;

16. Sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016

Nagoya;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu
mencurahkan berkat-Nya, Amin.

Batam, 20 Februari 2020

Javirawati
160710028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
2.1 Identifikasi Masalah	7
3.1 Batasan Masalah.....	8
4.1 Rumusan Masalah	8
5.1 Tujuan Penelitian	9
6.1 Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	11
2.1.2 Tinjauan tentang Perjanjian.....	16
2.2 Kerangka Yuridis	17
2.2.1 Pengertian Perjanjian	17
2.2.2 Syarat Syahnya Perjanjian.....	18
2.2.3 Asas-Asas dalam Perjanjian.....	19
2.2.4 Jenis-Jenis Perjanjian	22
2.2.5 Pelaksanaan Perjanjian.....	26
2.2.6 Berakhirnya Perjanjian.....	28
2.2.7 Penyelesaian Sengketa	29
2.2.8 Galangan Kapal	31
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 39
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	39
3.1.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2.1 Sifat Penelitian	40
3.2. Metode Pengumpulan Data	41
3.2.1 Jenis Data	41
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	42
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.3. Metode Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian	44
4.2. Pembahasan.....	59
4.2.1. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi oleh Para Pihak Terkait Jasa Perbaikan Kapal	59
4.2.2. Upaya Hukum yang dilakukan Oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia Atas Wanprestasi yang Terjadi.....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1. Simpulan	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran 1. Perjanjian Pembayaran dan Pelunasan Hutang	
Lampiran 2. Surat Somasi Pelunasan Hutang No 20/EHW/II/2018	
Lampiran 3. Surat Tanggapan Somasi No 314/HLL/T-BMP/III/18	
Lampiran 4. Surat Somasi II (Final)	
Lampiran 5. Surat Jawaban Somasi No 28/NAS/JS/III/2018	
Lampiran 6. Surat Tanggapan No 32-2/EHW/IV/2018	
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 9. Surat Persetujuan Izin Penelitian	